

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku:

- Adjie, Habib , 2009, *Sanksi Perdata dan Administrative Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur , 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Fajar N.D, Mukti dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Khie, Tan Thong (b), 2000,m *Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet.1, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi, Hadari , 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nico, 2003,*Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and studies of business Law, Yogyakarta.
- Notodisoerjo, R.Soegondo , 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (suatu Penjelasan)*, Cet ke-2, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sjaifurrachman, 2011,*Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cv.Mandar Maju,Jakarta
- Soekanto , Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sumardjono, Maria.S.W, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Tedjosaputro, Liliana , 1995, *Etika Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT Bayu Indra Grafika, Yogyakarta.

Thoha, Miftah, 2005, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Tobing. G.H.S. Lumban ,1998, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)* , Erlangga, Jakarta.

## 2. Tesis:

Margareth, Rona Ayu Edithya, 2014, “*Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman*”, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Noor, Hendry Julian, 2010, “*Jasa Notaris Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Memperkuat Rezim Anti Pencucian Uang*”, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Rahayu, Hastari Endah, 2014 ,”*Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Tugas Notaris di Kabupaten Cilacap*”, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## 3. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39/PW.07.10 tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Daerah



Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.HT.03.10.05 Tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.

Kode Etik Notaris Tahun 2015.

#### **4. Kamus:**

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Poerwadarminta , W.J.S.,1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.